

## **BAB III**

# **PROSES INVASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAK**

Pada bab yang ketiga ini penulis akan membahas tentang proses Amerika Serikat melakukan invasi terhadap Irak yang kemudian penulis akan membagi bab ini kedalam dua sub-bab yakni, terjadinya proses agresi militer yang di lepaskan Amerika Serikat terhadap Irak, kemudian mengembalikan kepercayaan global terhadap Amerika Serikat dan hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah.

### **3.1 Proses Agresi Militer Amerika Serikat Terhadap Irak**

19 Maret 2003 adalah sebuah tragedi dimana Amerika Serikat meluncurkan agresi militer penuh terhadap Irak., kurang lebih dari 150.000 tentara Amerika Serikat telah menduduki tanah Irak secara paksa. Dalam hal ini ada berupa temuan yakni faktor- faktor yang mempengaruhi tindakan invasi Amerika Serikat terhadap Irak. Secara umum ada lima alasan Amerika Serikat untuk dapat melakukan invasi terhadap Irak, antara lain yang pertama adalah senjata pemusnah masal atau “Weapons of Mass Destruction” (WMD) ini menjadi salah satu alasan utama penyerangan Amerika Serikat bahkan sebelum perang dimulai. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut terkait dengan interpretasi penilaian intelijen bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal.

Yang kedua adalah faktor pembenaran untuk menyerang Irak adalah ancaman terorisme yang telah dimunculkan oleh Saddam Husein. Pemerintahan Bush menganggap bahwa invasi yang dilancarkan ke Irak ini adalah perang melawan teror, teror yang menghancurkan gedung

WTC pada 11 september yang menyebabkan pergeseran pandangan sehingga memunculkan strategi kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat. Setelah tragedi 11 September pada umumnya pembuat kebijakan Amerika Serikat telah menyerukan invasi terhadap Irak salah satunya adalah Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld yang memberikan saran agar menggunakan kekuatan militer terhadap Saddam Husein. Maka dari itu, pemerintah Bush menyatakan memakai kekuatan militer, yang pertama untuk melawan Afghanistan dan setelah itu melawan Irak sebagai reaksi terhadap serangan 11 September.

Yang ketiga faktor penyebabnya adalah perang Irak dilihat sebagai proses kebebasan, bukan invasi karena rezim Saddam digambarkan sebagai salah satu diktator terjahat di dunia. Pemerintah AS dan intervensi militer koalisi sekutu setuju dengan memulai apa yang dikenal di Amerika Serikat sebagai “Operation Iraqi Freedom”. Pembebasan dan promosi demokrasi memiliki peran penting dalam perubahan rezim Irak.

Yang keempat adalah faktor terbentuknya aliansi yang sangat unik antara Amerika Serikat dan Israel untuk melawan ancaman yang berkembang di Timur Tengah yang akan memberikan manfaat besar bagi kedua negara ini. Bagi Amerika Serikat keamanan Israel itu merupakan hal yang paling penting dimana Amerika Serikat yang telah memberikan dukungannya dari tahun 1990an sebagai dampak dari ancaman kelompok teroris yang berasal dari dunia Arab dan negara lainnya (Mearsheimer & Walt , 2007, p. 32).

Yang terakhir adalah faktor ekonomi yaitu ingin menguasai lading minyak, isu-isu tentang minyak dan kekuatan militer ini mulai bangkit lagi di tahun awal abad ke dua puluh (Klare, 2004, p. 148). Hal ini juga didukung oleh Kepentingan Amerika Serikat di dalam sektor sumber daya minyak dan energinya bukanlah kepentingan yang baru. Kebijakan Amerika Serikat ini juga di dorong oleh dua hal yang memiliki

tujuan yaitu untuk dukungan Israel dan juga mengontrol secara tidak langsung pasar minyak di seluruh dunia dan juga mengamankan pasokan minyak untuk masa depan (Hinnebusch, 2007). Untuk mendapatkan kontrol dari minyak Irak syarat bagi Amerika Serikat ialah Amerika Serikat dapat mengurangi ketergantungannya dengan kawasan Eropa dan juga Asia Timur pada minyak teluk Persia artinya memang Amerika Serikat tidak ada keraguan bahwa hegemoni Amerika Serikat tergantung dari minyak dan sumber daya energi (Zunes, 2006, p. 29).

Dari data yang telah di peroleh adanya faktor alternatif yaitu adanya ancaman keamanan dari segi posisi Amerika Serikat di Timur Tengah. Dimulai dari doktrin Presiden Bush dengan asumsi bahwa Amerika Serikat pada era paska Perang Dingin merupakan satu-satunya negara adidaya di dunia dan salah satu negara yang akan berusaha untuk mempertahankan posisi hegemoni untuk masa depan yang tak terbatas. Kekuasaan adalah hal yang paling utama dari pemerintahan Bush (Sarkesian, Williams a, & Stephan J., 2008, p. 195) sehingga invasi adalah tindakan yang menurut Presiden Bush adalah rasional dalam mencapai tujuan utamanya dan juga untuk menunjukkan kekuatannya kepada sekutu dan juga pesaingnya. Dan dalam hal tersebut merupakan keinginan Amerika Serikat untuk memulai kebijakannya mengenai peningkatan strategi untuk memenuhi tujuan hegemony Amerika Serikat dan langkah pertama itu dimulai dengan perang Irak (Mearsheimer & Walt , 2007, p. 58).

Walaupun demikian setelah adanya analisis kembali terhadap adanya faktor-faktor penyebab agresi militer yang menjadi justifikasi invasi Amerika Serikat terhadap Irak adanya penemuan bahwa:

1. Dugaan Amerika Serikat bahwa Irak mensponsori terorisme tidak terbukti dan tidak ada bukti bahwa Saddam Husein terlibat dengan peristiwa 9/11 sehingga pemerintah Amerika Serikat berusaha menciptakan

sebuah kasus untuk memanipulasi opini publik agar agresi militer terhadap Irak dianggap legal sebagai respon terhadap ancaman yang dirasakan.

2. Inspektur senjata PBB tidak menemukan bukti adanya senjata pemusnah massal di Irak, karena setelah Gulf War I inspektur senjata PBB telah membongkar seluruh fasilitas pengembangan senjata nuklir, kimia, dan biologi di Irak. Kepemilikan senjata pemusnah massal menjadi alasan agar negara lain setuju pada rencana penyerangan Irak.
3. Alasan Amerika Serikat untuk memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat Irak dengan demokratisasi tidak terbukti karena hingga tahun 2011 pasukan militer Amerika Serikat masih melakukan pendudukan wilayah di Irak.
4. Keputusan untuk menggulingkan Saddam Hussein merupakan langkah pertama untuk mengubah posisi strategis Amerika Serikat di Timur Tengah, dengan adanya perang, Amerika Serikat dapat mendirikan pangkalan militernya di Irak untuk mengontrol wilayah Timur Tengah dan memberikan perlindungan penuh kepada Israel.
5. Pemicu terjadinya agresi Amerika Serikat terhadap Irak karena dendam lama dan belum tercapainya kesepakatan pada saat Gulf War I karena Irak telah melanggar Resolusi 687 Dewan Keamanan PBB.
6. Alasan utama agresi Amerika Serikat terhadap Irak adalah kontrol terhadap minyak Irak yang telah didominasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sebagai pilar utama dari hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah.

Dengan kembali menganalisa kebijakan dari Amerika Serikat di atas terhadap Irak ini, diketahui lagi bahwa *pursuit of national interest* dan *national security* adalah alasan utama untuk menjadikan dasar Amerika Serikat untuk memutuskan tindakan yang diambilnya terhadap Irak. Hal ini dapat terlihat karena adanya putusan yang telah diambil oleh Wakil Menteri

Pertahanan Paul Wolfowitz di dalam “Defense Planning Guidance 1992” dan menjadi pedoman strategi militer Amerika. Strategi tersebut telah menggambarkan bahwa Amerika harus mempertahankan kekuatan militernya dan menggunakannya dengan tujuan melemahkan negara-negara yang memiliki senjata pemusnah massal, termasuk Irak.

### **3.2 Mengumpulkan Dukungan Internasional**

Kemudian, dokumen “National Security Strategy 2002” juga memperlihatkan bahwa *pursuit of national interest* dan *national security* sangat erat kaitannya dalam setiap pembuatan kebijakan Amerika Serikat. Ketika menghadapi sebuah ancaman terhadap keamanan nasional, Amerika selalu melakukan tindakan antisipasi ancaman dengan merencanakan strategi preemptive melalui pemanfaatan kekuatan dominan militer Amerika Serikat untuk mencapai tujuan-tujuannya, termasuk hegemoni global. Berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, tindakan self defense untuk preemptive war diperbolehkan, yang dimaksud dengan self defence adalah ”bela diri” yang pada saat ini telah menempati konsep *preemptive strike* sebagaimana yang di klaim oleh Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme, akan tetapi self defence dapat dijadikan sebuah alasan ketika suatu negara terbukti melakukan serangan terhadap kedaulatan negara lain. Apabila tindakan serangan tidak terbukti, maka self defence tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan preventive war. Namun tindakan agresi Amerika Serikat terhadap Irak lebih pantas disebut sebagai preventive war, karena Irak tidak terbukti terlibat dalam serangan 9/11 (Iskandar & Thontowi, 2009).

Pada kawasan Timur Tengah Irak dinilai sebagai lokasi yang paling strategis untuk mendirikan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dimana Amerika Serikat mendapatkan keuntungan dengan sekutunya Israel di kawasan Timur Tengah. Kemudian Irak juga memiliki cadangan

minyak yang besar dan menguntungkan perusahaan minyak Amerika Serikat yang beroperasi di sana. Dengan adanya kekuatan militer dan dukungan perekonomian yang kuat, Amerika Serikat dapat mencapai tujuan hegemoni globalnya di Timur Tengah.

Piagam PBB adalah perjanjian internasional yang paling penting yang membentuk dasar dari perdamaian internasional dan sistem keamanan pada periode paska Perang Dunia II. Piagam mulai diterapkan pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco, dan mulai berlaku untuk AS dan Inggris sebagai perjanjian yang mengikat pada tanggal 24 Oktober 1945. Sebanyak 191 negara, termasuk AS, telah sepakat untuk mematuhi Piagam PBB. Berdasarkan Piagam PBB, penggunaan kekuatan militer hanya di bawah dua kondisi yakni ketika Dewan Keamanan memutuskan untuk menggunakan kekuatan militernya (Pasal 39 dan Pasal 42) dan pertahanan diri (Pasal 51) (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015).

Pada saat invasi militer Irak, yang secara sepihak dilakukan oleh Pasukan AS-Inggris sebagai “coalition of willing” merupakan masalah bagi integritas dan otoritas PBB karena melanggar banyak ketentuan misalnya Pasal 2 (4), 39, 42 dan 51 dari Piagam PBB dan merusak sistem hukum dan keamanan internasional paska Perang Dunia II secara keseluruhan (Kim, 2005, p. 3)

Kemudian pada saat pidatonya kepada bangsa pada 17 Maret 2003, Presiden Bush juga secara implisit bergantung pada doktrin pertahanan diri (self-defense) sebagai pembenaran lain untuk aksi militer sepihak melawan Irak (Kim, 2005, p. 5). Adapun pernyataan Bush yang dimaksud adalah:

*“The danger is clear. Using chemical, biological or, one day, nuclear weapons, obtained with the help of Iraq, the terrorists could fulfill their stated ambitions and kill*

*thousands or hundreds of thousands of innocent people in our country or any other....Before the day of horror can come, before it is too late to act, this danger will be removed. The United States of America has the sovereign authority to use force in ensuring its own national security"* (New York Times, 2003)

Kemudian Bush juga menyatakan keinginannya pada 20 September 2001 ke Kongres yang didasari oleh pidatonya pada malam 11 September yakni:

*"We will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime"* (Hinnebusch, 2007).

Terlihat pada saat pidato tersebut Presiden Bush beralasan bahwa serangan yang dilancarkan terhadap Irak itu adalah sebagai tindakan preemptive war. Dan Amerika Serikat akan memburu negara-negara yang akan memberi bantuan atau memberi perlindungan bagi terorisme. Karena Amerika Serikat akan menganggap bahwa setiap negara yang menjadi tempat berhenti atau memberi dukungan kepada terorisme akan dianggap sebagai musuh Amerika Serikat.

Dan kemudian dalam pidato tersebut Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan menyerang Irak adalah tindakan preemptive. Namun pada nyatanya, berdasarkan bukti yang ada terlihat bahwa tindakan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap penyerangan Irak adalah tindakan preventif. Karena pada kenyataannya serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak itu tidak terbukti bahwa Irak terlibat pada tragedi

serangan 9/11 dan juga memiliki terorisme. Kemudian dari hasil inspeksi senjata PBB, tidak adanya penemuan senjata pemusnah masal yang dituding dikembangkan oleh Irak, maka dari itu serangan Amerika Serikat terhadap Irak ini merupakan tindakan yang preventive karena tidak terbuktinya bahwa Irak ingin menyerang Amerika Serikat. Sangat berbeda pada saat Presiden Bush menegaskan bahwa serangan terhadap Irak merupakan serangan preemptive.

Namun invasi yang dilancarkan Oleh Amerika Serikat ini sebenarnya telah menambahkan penderitaan yang di alami oleh masyarakat Irak. Pada saat keterlibatan Amerika Serikat pada konflik Irak yang di mulai dengan Gulf War 1991 dan dua belas tahun kemudian Irak berada di bawah sanksi Internasional. Perang dan invasi yang diberikan kepada Irak inilah yang telah menghancurkan infrastuktur negara, baik secara fisik maupun social di salah satu negara kawasan Timur Tengah, Irak adalah negara yang memiliki system pendidikan yang terbaik di dunia Arab, dengan angka partisipasi 100 persen untuk sekolah dasar dan program keaksaraan yang efektif. Namun, selama masa invasi serta pendudukan Irak pada tahun 2003 kondisi Irak berubah, banyak konflik terjadi sehingga mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi masyarakat Irak (Zunes, 2006).

Mau tidak mau Irak merelakan kehancuran dari salah satu kota bersejarah Bagdad dan masjid bersejarah Al-Askari yang merupakan salah satu bukti peradaban manusia. Agresi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak dan pendudukan Amerika Serikat juga mengakibatkan pembentukan sistem politik sektarian sehingga memicu disintegrasi penduduk dengan terjadinya perbedaan antara kelompok-kelompok etnis dan agama Irak dengan di dominasi Sunni Arab di Irak tengah, Kurdi di utara, sebagian besar Syiah di selatan, dan kelompok-kelompok lain termasuk Turkoman, Assyria Kristen, dan Iran. Kemudian bulan September 2007, United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) memperkirakan bahwa



lebih dari 4 juta warga Irak terusir dari rumah mereka. Perkiraan ini dirilis satu setengah tahun setelah pemboman Masjid Al-Askari di Samara oleh kelompok militan yang telah memicu serentetan kekerasan sektarian 138 mematikan di Irak. UNHCR menyatakan bahwa lebih dari 2,5 juta warga Irak telah mengungsi dan 2,2 juta pengungsi eksternal menuju negara-negara tetangga Irak dari Yordania, Suriah, Lebanon, Turki, dan Mesir. Meskipun perpindahan ini mulai terjadi sebelum 2003, secara intensif terjadi peningkatan antara tahun 2006-2007 di mana 1,5 juta warga Irak mengungsi dan sekitar 60.000 warga Irak meninggalkan kewarganegaraan mencari suaka di negara-negara industri (UNHCR, 2007).

Dilanjutkan pada tahun 2010, diperkirakan kurang lebih sebanyak 3,5 juta orang dari semua populasi 31,5 juta jiwa mengungsi dan tetap tinggal di pengungsian, Para "internally displaced persons (IDP)", "refugees", "asylum seekers", "returned refugees", "stateless persons", dan "returned IDPs" terus memerlukan dukungan UNHCR dan organisasi lokal dan internasional lainnya (UNHCR, 2011)

Dari permasalahan tempat tinggal, keamanan pangan, lapangan kerja, serta pelayanan dasar kesehatan untuk masyarakat seperti air bersih, akses ke perawatan kesehatan, dan sanitasi juga dianggap sebagai isu utama yang menjadi pusat perhatian bagi pengungsi Isu-isu ini mencerminkan masalah dalam pelayanan publik dan infrastruktur yang dihadapi penduduk negara secara keseluruhan. Menurut Food Security Assessment, berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2006 dengan 1.188 rumah tangga IDP di Irak untuk World Food Program (WFP), lebih dari setengah (57 persen) dari rumah tangga pengungsi yang disurvei melaporkan mengalami kekurangan dalam makanan dan melakukan strategi khusus untuk mengatasinya (WFP, 2008, p. 3)

Walaupun demikian, terdapat adanya dampak positif dari agresi Amerika Serikat terhadap Irak tersebut, yakni salah satunya Irak telah belajar mengenal sistem pemilihan umum

yang sebelumnya tidak pernah dilakukan di Irak. Selama 24 tahun masa pemerintahan otoriter Saddam Hussein yakni dimulai pada 16 Juli 1979 sampai dengan 30 Desember 2003, Irak tidak pernah diperkenalkan dengan sistem pemilu yang demokratis. Selain itu, angkatan bersenjata Irak diberikan keuntungan dengan adanya pelatihan dari pasukan militer AS. Transfer teknologi militer memberikan kemajuan bagi Irak sehingga banyak kemajuan yang dibuat selama waktu itu, seperti partisipasi penduduk setempat untuk membantu mempertahankan wilayahnya masing-masing. Para penduduk menjaga lingkungan agar aman dan pasukan AS memberikan informasi ketika pemberontakan muncul di daerah, sehingga dapat meminimalisir korban jiwa (New York Times, 2003).

Ketika perusahaan-perusahaan asing yang datang untuk mengolah minyak di Irak yang membawa dampak positif seperti optimalisasi potensi minyak di Irak. Pemanfaatan teknologi perminyakan yang tepat membawa Irak berada di posisi kelima di dunia sebagai negara pemilik cadangan minyak terbesar dan posisi ketiga di Timur Tengah. Irak memproduksi 2,29 juta barel minyak per tahun 2012. Cadangan minyak Irak terkonsentrasi di kawasan Syiah di selatan serta kawasan Kurdi di utara. Lima lapangan minyak raksasa Irak berada di selatan Irak, yang menyumbang hampir 60% cadangan minyak negara tersebut, sementara di utara menyumbang 17% cadangan minyak. Sebagian besar produksi minyak Irak datang dari pertambangan Kirkuk dan Rumaila. Irak juga memiliki beberapa pertambangan lepas pantai termasuk West Qurna, Az Zubair, Halfaya, Garraf, Badra dan Majnoon, yang diperkirakan memiliki cadangan minyak sebesar 14 miliar barel. West Qurna dengan cadangan minyak 12,8 miliar barel merupakan salah satu lapangan minyak terbesar di dunia yang belum seluruhnya dikembangkan. Irak memiliki empat perusahaan minyak negara, yakni North Oil Company (NOC), Midland Oil Company (MDOC), South Oil

Company (SOC) dan Missan Oil Company (MOC) (Agustinus, 2016).

### **3.3 Kesimpulan**

Faktor-faktor invasi Amerika Serikat terhadap Irak didasari oleh kepentingan hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Dengan menggulingkan rezim Saddam Husein dan ingin menggantikan pemerintahan Irak dengan pemimpin yang lebih pro terhadap Amerika Serikat dan sistem yang paling cocok dengan keinginan Amerika Serikat adalah sistem demokrasi yang pemimpinnya akan diusung yang pro terhadap Amerika Serikat agar perusahaan-perusahaan swasta Amerika Serikat dapat mengelola minyak yang semakin berkembang di Irak. Dan Agresi Amerika Serikat adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kepentingan nasional adalah salah satu faktor invasi Amerika terhadap Irak yakni kepentingan atas “*Global war on terror*” yang disebabkan oleh tragedi 9/11 yang menyebabkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat kearah untuk meningkatkan “*struggle of power*” untuk mendapatkan hegemoni globalnya di Timur Tengah. Amerika Serikat juga ingin menguasai minyak Irak dan juga ingin membangun pangkalan militer di Irak karena kawasan ini adalah kawasan yang sangat strategis di kawasan Timur Tengah yang dapat mengontrol negara-negara di kawasan tersebut. Kemudian yang terakhir faktor invasi ini adalah mengembalikan hegemoni global karena tragedi 9/11 yang menjadikan kegagalan Amerika Serikat dalam menjaga keamanan nasionalnya yang menurunkan kepercayaan global terhadap kekuatan Amerika Serikat sehingga Irak yang dianggap “*grave and gathering danger*”. Agresi militer AS terhadap Irak bertujuan untuk menunjukkan kekuatan AS kepada dunia bahwa AS merupakan negara yang kuat dalam segala aspek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, M. (2016). *Pertamina Punya Cadangan Minyak 16 Miliar Barel di Irak*. Jakarta: detikFinance.
- Hinnebusch, R. (2007, Oktober 1). The US Invasion of Iraq: Explanations and Implications. *Critique: Critical Middle Eastern Studies*, 16(3), 212.
- Iskandar, P., & Thontowi, J. (2009). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)*. Retrieved Maret 5, 2019, from Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia:  
<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Perserikatan-Bangsa-Bangsa.aspx>
- Kim, J. (2005). The Crime of Aggression Against Iraq. *Equipo Nizkor*, 3.
- Klare. (2004). *Blood and oil: The dangers and consequences of America's growing dependency on imported petroleum*. England: Penguin.
- Mearsheimer, J., & Walt, S. (2007). *The Israel Lobby and US Foreign Policy*. United States: Hardback.
- New York Times. (2003). *Iraq War*. New York Times.
- Sarkesian, S. C., Williams a, J. A., & Stephan J., C. (2008). *National Interest and National Security - US National Security: Policymakers, Processes, and Politics*. USA: Lynne Rienner Publisher.

UNHCR. (2007). *Static of Displaced Iraqis around the World: Global Overview*. Retrieved Maret 5, 2019, from UNHCR: <https://www.unhcr.org/461f7cb92.pdf>

UNHCR. (2011). *Global Appeal 2010-2011 in Iraq*. Retrieved Maret 4, 2019, from UNHCR: <https://www.unhcr.org/iraq.html>

WFP. (2008). *Rapid Food Security Assessment of IDPs in Iraq*. Retrieved Maret 2, 2019, from World Food Programme: [documents.wfp.org/stellent/groups/public/.../wfp190653.pdf](https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/.../wfp190653.pdf).

Zunes. (2006). *The United States Belligerent Hegemon. In: The Iraq war: causes and consequences*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.